



**P E M E R I N T A H
KABUPATEN MOJOKERTO**



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN ANGGARAN 2026

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunannya secara rinci acuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua.Amin

DAFTAR ISI

KataPengantar.....	i
DaftarIsi	ii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud danTujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
Bab V PENUTUP	42

BAB I

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
28. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ 27/416-050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.

29. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/21 /416-050/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Ranwal Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2026. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91,88%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94,80%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 90,55%
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87,88%
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,26%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 96,86%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0%
 - Penyediaan bahan/ material 87,78%

- Fasilitas Kunjungan Tamu 93,93%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94,85%
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96,26%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98,25%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96,27%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84,33%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74,16%
- g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 98,02%
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 92,62%
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 66,97%
- h) Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95,59%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pencapaian kinerja program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah terlaksananya Tri Fungsi Dewan (Legislasi, Budgeting dan Pengawasan) serta terfasilitasinya Hak DPRD sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 84,03%
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 82,43%

- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik 96,29%
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
 - Pembahasan KUA dan PPAS 93,08%
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 74,70%
 - Pembahasan APBD 85,64%
 - Pembahasan APBD Perubahan 84,84%
 - Pembahasan Laporan Semester 95,34%
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 97,58%
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 99,00%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 91,52%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 95,28%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 94,87%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 92,47%
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 91,64%
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran 85,02%
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 98,05%
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD 78,65%
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 99,59%
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 94,92%
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 54,40%
 - Penyusunan Program Kerja DPRD 93,85%
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 96,94%
 - Pelaksanaan Reses 96,41%
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Pengawasan Kode Etik DPRD 91,22%

g) Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 96,84%
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 96,43%
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 85,98%
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 95,30%

Secara umum capaian realisasi anggaran dari 15 (limabelas) kegiatan dengan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan di atas mencapai 93,96%. Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

Tabel.1.1. (T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Rensra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	81,38	78,68	79	80,25	105 %	80,50	80,50	98,61 %
		Jumlah Inovasi			1	1	100%	1	2	66%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun								

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	6	100	6	12	40%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	27	27	100	27	27	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	85	80	81	90,25	111	82	90,25	120%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350	70	70	70	100	70	140	40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	5	5	5	100	5	10	40%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	0	0	0	1	20%
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	12	12	12	100	12	24	40%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	180	36	36	36	100	36	72	40%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	120	24	24	24	100	24	48	40%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	290	58	58	58	100	58	116	40%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi								
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD	50	50	50	50	100	50	50	100%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	15	3	3	3	100	3	6	40%

	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	60	39	50	36	72%	50	75	12,5 %
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi								
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD	60	12	12	12	100	12	24	40%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi								
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi								
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	2	2	2	100%	2	4	40%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20	6	6	5	83%	8	11	55%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	20	4	3	2	66%	4	10	40%

		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi								
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas								
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi pelaksanaan APBD per Semester	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	1	1	1	100	1	2	40%
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi								

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi								
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	20	4	4	4	100	4	8	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20	4	4	4	100	4	8	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20	4	4	4	100	4	8	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10	2	2	2	100	2	4	40%

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	1	1	1	100	1	2	40%
		Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan								
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi								
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	30	6	6	6	100	6	12	100
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi dewan	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100	24	20	22	110	20	46	46%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	150	30	30	24	80%	30	44	29%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana Kerja DPRD	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi								

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	14	3	3	3	100	2	6	42,85 %
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi								
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20	4	4	4	100	4	8	40%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Kinerja fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi	20	4	4	4	100	4	8	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel TC 30

Tabel 1.2.(T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-3)	tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (thn n+1)	
		4	5	6	7		8	9	10		11		12	13
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Kesekretariatan DPRD			70%					70.16%					
	Persentase Perda yang disyahkan			85%					100%					
	Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan			85%					89%					
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi.				75	75	80			60%	83,33%		90%	
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi				90	90	91			90%	100%		100%	
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi				80	81	85			80%	100%		100%	
	Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan				90	90	90			90%	99,5%		95%	

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 bahwa di Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 93.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja melalui metode survey dan wawancara kepada anggota DPRD di semester I dan Semester II, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2024 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 93 atau mencapai 100% atau kategori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2024 mempunyai nilai kinerja sebesar 93.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD di tahun 2024 yaitu sebesar 93 telah terpenuhi

Untuk lebih detailnya dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 53 dengan interpretasi Fasilitas Umum perlu ditingkatkan.
- b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 63,00 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- d. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- e. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- f. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) sebesar 54,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- g. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- h. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- i. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 93.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, maka dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel TC 31 Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto telah sesuai.

Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Nilai SAKIP	82 (A)	50.145.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Nilai SAKIP	82 (A)	50.145.000.000	
			Jumlah inovasi	1				Jumlah inovasi	1		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target	100 %	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target	100 %	60.000.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Renja Perangkat Daerah yang Tersusun	3 dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MOJ OKE RTO	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.000.000	
						RSK :					
						1. Dok renja 2026			1		
						2. Dok renja perubahan 2025			1		
						3. Dok Renstra 2025 - 2029			1		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJ OKE RTO	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	30.000.000	
						RSK :					
						1. Laporan Capaian Kinerja tribulan			4		
						2. LKJIP			1		
						3. SAKIP			1		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	96%	3.500.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	96%	3.500.000.000	
	Penyediaan Gaji dan		Jumlah bulan	25 orang/bulan	3.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang	25 orang/bul	3.500.000.000	

	Tunjangan PNS	MOJOKERTO	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN			PNS	MOJOKERTO	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	an		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN	86	700.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MOJOKERTO	IP ASN	86	700.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MOJOKERTO	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi	90 stel	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MOJOKERTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 stel	100.000.000	
						RSK :					
						Keky			30 stel		
						Putih-Hitam			30 stel		
						Batik Surya			30 stel		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi	70 orang	600.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MOJOKERTO	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	600.000.000	
						RSK :					
						Workshop ASDEKSI			7 x 10 orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	2.835.000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	2.835.000,000	
	Penyediaan Peralatan	MOJOKERTO	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3 paket	1.500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	MOJOKERTO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	1.500.000.000	

	n dan Perlengkap an Kantor		an Kantor			Kantor	RTO	yang Disediakan			
						RSK :					
						Mebelair			1 paket		
						Laptop			1 paket		
						Printer			1 paket		
	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	MOJOKERTO	Jumlah bulan Fasilitasi makan minum rapat SKPD	10 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MOJ OKE RTO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	35.000.000	
						RSK :					
						Makan minum rapat staf			12 kali		
	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Pengada an Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	300.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MOJ OKE RTO	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	300.000.000	
						RSK :					
						Cetak Kebutuhan Kantor			1 paket		
	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- ng-	MOJOKERTO	Jumlah Paket Pengadaa n Bacaan dan Peraturan Perundang-	0 dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	MOJ OKE RTO	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	0 dokumen	0	

	Undangan		Undangan					yang Disediakan			
						RSK :					
						Buku aturan persidangan dan keuangan			1 paket		
	Penyediaan bahan/Material	MOJOKERTO	Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	250.000.000	Penyediaan Bahan / Material	MOJOKERTO	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	250.000.000	
						RSK :					
						Alat Tulis kantor			1 paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	250.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	250.000.000	
						RSK :					
						Makan minum Tamu			12 bulan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJOKERTO	Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	500.000.000	
						RSK :					
						Laporan Perjalanan Dinas			12 Laporan		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100 %	3.000.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100 %	3.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12 laporan	700.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 laporan	700.000.000	

	Air dan Listrik		s, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				RTO	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
						RSK :					
						Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik			12 laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Bertungsi Baik	12 laporan	2.300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MOJ OKER TO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.300.000.000	
						RSK :					
						Laporan Penyediaan Jasa kebersihan, THL dan Keamanan			12 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	2.500.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	2.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	27 unit	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	27 unit	600.000.000	

	Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya			lapangan		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya			
						RSK :					
						Mobil Pimpinan			5		
						Mobil Kabag			3		
						Mobil Oprasional			2		
						Motor Roda 2			7		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOKERTO	Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	1 unit	1.600.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOKERTO	Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	1 unit	1.600.000.000	
						RSK :					
						Pemeliharaan Gedung DPRD			1 unit		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	48 unit	300.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MOJOKERTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	48 unit	300.000.000	

	an Lainnya		Direhabilitasi								
						RSK : Pemeliharaan					
						Printer			20 unit		
						Laptop			8 unit		
						PC			15 unit		
						LCD			3 unit		
						Genset			1 unit		
						Sound System			1 unit		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	91%	36.800.000.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	91%	36.800.000.000	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD per bulan	50 orang	36.000.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD per bulan	50 orang	36.000.000.000	
						RSK :					
						Gaji Pimpinan dan anggota DPRD			50 orang		

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 paket	700.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJ OKE RTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 paket	700.000.000	
						RSK :					
						PDH			50 stel		
						PSL			50 stel		
						PSR			50 stel		
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up	35 orang	100.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJ OKE RTO	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 orang	100.000.000	
						RSK					
						Paket Cek Kesehatan pimpinan dan anggota DPRD			50 orang		
	Layanan Administrasi DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100%	750.000.000	Layanan Administrasi DPRD	MOJ OKE RTO	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100%	750.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	750.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	MOJ OKE RTO	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	750.000.000	
						RSK :					

						Laporan bulanan hasil fasilitasi rapat			12 laporan		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	MOJOKERTO	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	80	73.810.000.000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	MOJOKERTO	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82	73.810.000.000	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	80%	11.700.000.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	80%	11.700.000.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas	1 dokumen	1.700.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	1.700.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Propemperda			1 dokumen		
	Pembahasan Rancangan Peraturan	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Raperda yang	6 dokumen	5.000.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	8 dokumen	5.000.000.000	

	Daerah		Dibahas				RTO	Rancangan Peraturan Daerah			
						RSK :					
						Raperda Inisiatif DPRD			4 Dokumen		
						Raperda usulan Eksekutif			4 Dokumen		
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun	4 dokumen	5.000.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	5.000.000.000	
						RSK :					
						NA Raperda Inisiatif Komisi I, II, III, IV			4 dokumen		
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	MOJOKERTO	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90%	14.100.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	MOJOKERTO	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90%	14.100.000.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	MOJOKERTO	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	1 dokumen	1.800.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1.800.000.000	
						RSK :					

						Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2026			1 dokumen		
	Pemba hasan Peruba han KUA dan Peruba han PPAS	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas	1 dokumen	1.800.000.00 0	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	MOJ OKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1.800.000.000	
						RSK :					
						Dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2025			1 dokumen		
	Pemba hasan APBD	MOJOKERTO	Jumlah Dokume n APBD yang Dibahas	0 dokumen	5.000.000.00 0	Pembahasan APBD	MOJ OKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	5.000.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Rekomendasi hasil Pembahasan APBD 2026			1 dokumen		
	Pemba hasan APBD Peruba han	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas	1 dokumen	1.800.000.00 0	Pembahasan APBD Perubahan	MOJ OKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1.800.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Rekomendasi hasil pembahasan APBD Perubahan 2025			1 dokumen		

	Pemba hasan Lapora n Semest er	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester	1 dokumen	1.000.000.00 0	Pembahasan Laporan Semester	MOJ OKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1.000.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Rekomendasi hasil pembahasan laporan semester			1 dokumen		
	Pemba hasan Pertang gungja waban APBD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Pertang gungjawab an APBD yang Dibahas	1 dokumen	2.700.000.00 0	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggu ngjawab an APBD	1 dokumen	2.700.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Rekomendasi hasil pembahasan Pertanggungjawab an APBD			1 dokumen		
	Pengaw asan Penyele nggaraa n Pemerin tahan	MOJOKERTO	Persentase Pengawasa n Penyeleng garaan Pemerintah an terfasilitasi	85%	18.250.000.00 0	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	MOJO KERTO	Persentase Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintahan terfasilitasi	85%	18.250.000.000	
	Pengaw asan Urusan Pemer intahan bidang Pemer intahan	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerinta han dan Produk Hukum yang	4 laporan	3.300.000.00 0	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	MOJ OKE RTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Urusan Pemerinta han Bidang Pemerinta han dan Hukum	4 laporan	3.300.000.000	

	dan Hukum		Diawasi								
						RSK :					
						Laporan Tribulan hasil pengawasan			4 laporan		
	Pengaw asan Urusan Pemer intahan Bidang Infrastr uktur	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Bidang Infrastrukt ur yang Diawasi	2 laporan	1.650.000.00 0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	MOJ OKE RTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Infrastruktur	2 laporan	1.650.000.000	
						RSK :					
						Laporan Tribulan hasil pengawasan			2 laporan		
	Pengaw asan Urusan Pemer intahan Bidang Kesejah teraan Rakyat	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahter aan Rakyat yang Diawasi	4 laporan	3.900.000.00 0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	MOJ OKE RTO	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	3.900.000.000	
						RSK :					
						Laporan Tribulan hasil pengawasan			4 laporan		
	Pengaw asan Urusan Pemer intahan	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintah an Bidang Perekono mian yang	4 laporan	3.300.000.00 0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	MOJ OKE RTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Perekonomia	4 laporan	3.300.000.000	

	Bidang Perekonomian		Diawasi					n			
						RSK :					
						Laporan Tribulan hasil pengawasan			4 laporan		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi	2 laporan	1.650.000.00 0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	MOJ OKE RTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 laporan	1.650.000.000	
						RSK :					
						Laporan Tribulan hasil pengawasan			2 laporan		
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi	1 laporan	1.100.000.00 0	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	MOJ OKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	1 laporan	1.100.000.000	

						RSK :					
						Laporan hasil pembahasan LHP BPK			1 laporan		
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi	2 dokumen	1.350.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 dokumen	1.350.000.000	
						RSK :					
						Laporan Tribunal hasil pengawasan			2 laporan		
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas	1 dokumen rekomendasi	2.000,000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen rekomendasi	2.000,000.000	
						RSK :					
						Dokumen hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1 dokumen		
	Peningkatan Kapasitas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	12.200.000.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	12.200.000.000	

			asi								
	Penda laman Tugas DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen hasil pendalam an tugas DPRD	6 dokumen	10.000.000.0 00	Pendalaman Tugas DPRD	MOJ OKER TO	Jumlah dokumen hasil pendalama n tugas DPRD	6 dokumen	10.000.000.00 0	
	Publikasi dan Dokume ntasi Dewan	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Publikasi dan Dokument asi Dewan	12 dokumen	800.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	MOJ OKE RTO	Jumlah dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	800.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			12 dokumen		
	Penyedia an Kelompo k Pakar dan Tim Ahli	MOJOKERTO	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediaka n	40 Orang	200.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	MOJ OKE RTO	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	40 Orang	200.000.000	
						RSK :					
						Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan ubntuk pembahasan			70 orang		

	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJOKERTO	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	40 orang	100.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJOKERTO	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	40 orang	100.000.000	
						RSK :					
						Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan untuk Fraksi saat pembahasan			70 orang		
	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	1.100.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1.100.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Program Kerja DPRD 2026			1 Dokumen		
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	MOJOKERTO	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	95%	4.860.000.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	MOJOKERTO	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100%	4.860.000.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	60.000.000	
						RSK :					

						Dokumen Pokok Pikiran DPRD 2026			1 Dokumen		
	Pelaksanaan Reses	MOJOKERTO	Jumlah kegiatan reses terseda	3 dokumen	2.700.000.000	Pelaksanaan Reses	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	2.700.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Pelaksanaan Reses			3 Dokumen		
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	12.000	2.100.000.000					2.100.000.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	81%	400.000.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	81%	400.000.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	400.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	400.000.000	
						RSK :					
						Laporan Pengawasan Kode Etik			4 Laporan		
	Fasilitasi Tugas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	81%	12.300.000.000	Fasilitasi Tugas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	81%	12.300.000.000	

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	5.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	MOJ OKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	5.000.000.000	
						RSK :					
						Dokumen hasil Konsultasi Koordinasi tribulan			4 dokumen		
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun	1 Dokumen	950.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJ OKERTO	Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun	1 Dokumen	950.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Laporan Kinerja DPRD			1 dokumen		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 dokumen	1.350.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJ OKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 dokumen	1.350.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Hasil fasilitasi Pelaksanaan tugas Banmus DPRD			2 Dokumen		

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	5.000.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	5.000.000.000	
						RSK :					
						Dokumen Hasil fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4 Dokumen		

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jenderal DPRD RI dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah unsur penunjang DPRD yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktotor sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

“Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD”.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujua/Sasaran	Capaian 2024	Target 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM	93	94
		Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	IKM	93	94

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

b. Adapun program-program di tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut

Program Utama :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Dari program tahun 2025 tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
 - 1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
 - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.2.3 Pembahasan APBD
 - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
 - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
 - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 1.3.2 Pelaksanaan Reses
 - 1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1.4.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya

Alam

- 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1.6.1 Pendalaman Tugas DPRD
 - 1.6.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 1.6.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 1.6.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 1.6.5 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
 - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material
 - 2.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.7 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
 - 2.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

2.7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2.8 Layanan Administrasi DPRD

2.8.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 sebagaimana perubahan RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 tertuang dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	Setwan	82 (BB)	52.152.631.000	APB D		82,5 (A)	53.010.000.000
		Jumlah inovasi		1				1	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Setwan	100%	60.000.000	APB D		91%	80.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	2 dokumen	30.000.000	APB D		2 dokumen	40.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setwan	6 laporan	30.000.000	APB D		4 dokumen	40.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Setwan	85%	3.500.000.000	APB D		86%	4.000.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Setwan	27/ bulan	3.500.000.000	APB D		14 bulan	4.000.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	Setwan	83	700.000.000	AP BD		84%	800.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Setwan	27 Stel/1 paket	100.000.000	AP BD		30 stel	100.000.000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	70 orang	600.000.000	AP BD		7 kegiatan	700.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	Setwan	100%	2.835.000.000	AP BD		100%	4.330.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Setwan	3 paket	1.500.000.000	AP BD		3 paket	2.660.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Setwan	12 paket	35.000.000	AP BD		1 paket	55.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Setwan	1 paket	300.000.000	AP BD		1 paket	350.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Setwan	1 dokumen	0	AP BD		1 paket	15.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan	Setwan	12 paket	250.000.000	AP BD		1 paket	250.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Setwan	12 laporan	250.000.000	AP BD		12 bulan	300.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	12 laporan	500.000.000	APBD		12 bulan	700.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Setwan	84 %	3.000.000.000	AP BD		84 %	3.350.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Setwan	12 laporan	700.000.000	AP BD		12 bulan	850.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Setwan	12 laporan	2.300.000.000	AP BD		12 bulan	2.500.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Setwan	84 %	2.500.000.000	AP BD		85 %	2.800.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan d bayarkan pajak dan perijinannya	Setwan	27 unit	600.000.000	AP BD		27 unit	700.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Setwan	1 unit	1.600.000.000	AP BD		1 unit	1.600.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Setwan	58 unit	300.000.000	AP BD		58 unit	500.000.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	Setwan	92%	36.800.000.000	AP BD		93%	36.800.000.000
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD	Setwan	50 orang/ bulan	36.000.000.000	AP BD		50 orang/ bulan	36.000.000.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Setwan	3 paket/org	700.000.000	AP BD		3 paket/ org	700.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Setwan	30 orang	100.000.000	AP BD		30 orang	100.000.000

	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	Setwan	100%	750.000.000	AP BD		100%	850.000.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD	Setwan	12 laporan	750.000.000	AP BD		12 laporan	850.000.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi		87,5%	73.810.000.000			87,5%	88.470.000.000
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	Setwan	80%	11.700.000.000	AP BD		80%	12.000.000.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Setwan	2 dokumen	1.700.000.000	AP BD		2 dokumen	2.000.000.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	8 dokumen	5.000.000.000	AP BD		4 dokumen	5.000.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Setwan	4 dokumen	5.000.000.000	AP BD		4 dokumen	5.000.000.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	Setwan	90%	14.100.000.000	AP BD		90%	18.000.000.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	1 dokumen	1.800.000.000	AP BD		1 dokumen	2.500.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Setwan	1 dokumen	1.800.000.000	AP BD		1 dokumen	2.500.000.000
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	Setwan	1 dokumen	5.000.000.000	AP BD		1 dokumen	5.500.000.000

	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	Setwan	1 dokumen	1.800.000.000	AP BD		1 dokumen	2.500.000.000
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi pelaksanaan APBD per Semester	Setwan	1 dokumen	1.000.000.000	AP BD		1 dokumen	1.500.000.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Setwan	1 dokumen	2.700.000.000	AP BD		1 dokumen	3.500.000.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	Setwan	90%	18.250.000.000	AP BD		90%	27.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Setwan	4 laporan	3.300.000.000	AP BD		24 kegiatan	5.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	Setwan	2 laporan	1.650.000.000	AP BD		12 kegiatan	3.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	4 laporan	3.900.000.000	AP BD		24 kegiatan	5.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	4 laporan	3.300.000.000	AP BD		24 kegiatan	5.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Setwan	2 laporan	1.650.000.000	AP BD		12 kegiatan	3.000.000.000
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Setwan	1 dokumen	1.100.000.000	AP BD		1 dokumen	1.500.000.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Setwan	2 dokumen	1.350.000.000	AP BD		12 kegiatan	2.000.000.000

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Setwan	1 dokumen	2.000.000.000	AP BD		1 dokumen	2.500.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	Setwan	90%	12.200.000.000	AP BD		90%	8.600.000.000
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Setwan	6 dokumen	10.000.000.000	AP BD		6 dokumen	6.000.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi dewan	Setwan	12 dokumen	800.000.000	AP BD		12 dokumen	900.000.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Setwan	10 Orang	200.000.000	AP BD		10 Orang	200.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	70 orang	100.000.000	AP BD		70 orang	100.000.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana Kerja DPRD	Setwan	1 dokumen	1.100.000.000	AP BD		1 dokumen	1.400.000.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi		100%	4.860.000.000	AP BD		100%	5.370.000.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Setwan	1 dokumen	60.000.000	AP BD		1 dokumen	70.000.000
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Setwan	3 dokumen	2.700.000.000	AP BD		3 dokumen	3.000.000.000
	Sosialisasi Perda	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Perda	Setwan	orang	2.100.000.000	AP BD		orang	2.300.000.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		81%	400.000.000	AP BD		81%	500.000.000
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	Setwan	4 laporan	400.000.000	AP BD		4 laporan	500.000.000

	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	Setwan	81%	12.300.000.000	AP BD		81%	17.000.000.000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Setwan	4 Dokumen	5.000.000.000	AP BD		4 Dokumen	8.500.000.000
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Kinerja fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Setwan	1 laporan	950.000.000	AP BD		1 laporan	1.500.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi	Setwan	2 Dokumen	1.350.000.000	AP BD		2 Dokumen	2.000.000.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi	Setwan	4 Dokumen	5.000.000.000	AP BD		4 Dokumen	5.000.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”**, ditempuh melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan misi ke 1 (satu) yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dengan tujuan RPJMD. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan melalui program – program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak mempunyai penelaahan usulan program dan kegiatan yang mendukung Program Tahun 2026 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

TABEL 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026
SESUAI RANCANGAN RENJA 2026

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	K/L	Rp	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					Nilai SAKIP	82 (A)	SET WAN	50.145.000.000					
							Jumlah Inovasi	1							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		90%		60.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	SET WAN	30.000.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 laporan	SET WAN	30.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Presentase realisasi anggaran perangkat daerah		85%	SET WAN	3.500.000.000					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yg menerima Gaji dan			27/ bulan	SET WAN	3.500.000.000					

				Tunjangan ASN per bulan										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN		86	SET WAN	700.000.000					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya			27 Stel/1 paket	SET WAN	100.000.000					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang- undangan			70 orang	SET WAN	600.000.000					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%	SET WAN	3.965.000.000					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 paket	SET WAN	1.500.000.000					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan			10 paket	SET WAN	35.000.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			1 paket	SET WAN	300.000.000					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			1 dokum en	SET WAN	0					
		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material			12 paket		250.000.000					

				(ATK) yang di sediakan											
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu			12 laporan	SET WAN	250.000.000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	SET WAN	500.000.000						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95%		0						
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan		Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan			4		0						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		80 %	SET WAN	3.000.000.000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik			12 laporan	SET WAN	700.000.000						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	SET WAN	2.300.000.000						

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik		84 %	SET WAN	2.500.000.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan dinas operasional dan lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dipelihara di bayarkan pajaknya			27 unit	SET WAN	600.000.000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			1 unit	SET WAN	1.600.000.000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			58 unit	SET WAN	300.000.000					
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	91%	92%	SET WAN	36.600.000.000					
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD			50 orang/bulan	SET WAN	36.000.000.000					
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan			150 paket	SET WAN	700.000.000					
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD			50 orang	SET WAN	100.000.000					

		Layanan Administrasi DPRD			Persentase layanan Administrasi DPRD	100%	100%	SET WAN	800.000.000					
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil Fasilitasi koordinasi dan Konsultasi DPRD		100%	12 laporan	SET WAN	750.000.000					
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	70%	SET WAN	73.810.000.000					
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan daerah dan peraturan DPRD terfasilitasi		85%	SET WAN	11.700.000.000					
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah			2 dokumen	SET WAN	1.700.000.000					
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil Raperda			8ndokumen	SET WAN	5.000.000.000					
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik		Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			4 dokumen	SET WAN	5.000.000.000					

		Pembahasan Kebijakan Anggaran			Persentase dokumen kebijakan Anggaran dibahas			90%	SET WAN	14.100.000.000					
		Pembahasan KUA dan PPAS			Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS			1 dokumen	SET WAN	1.800.000.000					
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan perubahan PPAS			1 dokumen	SET WAN	1.800.000.000					
		Pembahasan APBD			Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD			1 dokumen	SET WAN	5.000.000.000					
		Pembahasan APBD Perubahan			Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan			1 dokumen	SET WAN	1.800.000.000					
		Pembahasan Laporan Semester			Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester			1 dokumen	SET WAN	1.000.000.000					
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 dokumen	SET WAN	2.700.000.000					
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	85%	SET WAN	18.250.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan			4 Laporan	SET WAN	3.300.000.000					

					bidang pemerintahan dan Hukum										
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur			2 laporan	SET WAN	1.650.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat			4 laporan	SET WAN	3.900.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian			4 laporan	SET WAN	3.300.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber daya alam			2 laporan	SET WAN	1.650.000.000					
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK			1 dokumen	SET WAN	1.100.000.000					
		Pengawasan Penggunaan Anggaran			Jumlah Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran			1 dokumen	SET WAN	1.350.000.000					
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan			1 dokumen	SET WAN	2.000.000.000					

				keterangan pertanggungja waban kepala daerah										
		Peningkatan Kapasitas DPRD				Persentase peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	SET WAN	12.200.000.000					
		Pendalaman Tugas DPRD			Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi		6 dokum en	SET WAN	10.000.000.000					
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Jumlah Dokumen penyebar luasan produk hukum daerah, publikasi dan Dokumentasi dewan		12 dokum en	SET WAN	800.000.000					
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		10 orang	SET WAN	200.000.000					
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah tenaga ahli Fraksi		70 orang	SET WAN	100.000.000					
		Penyusunan Program Kerja DPRD			Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		1 dokum en	SET WAN	1.100.000.000					
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpuna n aspirasi masyarakat terfasilitasi	100%	SET WAN	4.850.000.000					
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun		1 dokum en	SET WAN	60.000.000					

		Pelaksanaan Reses			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses			3 dokum en	SET WAN	2.700.000.000					
		Sosialisasi Perda			Jumlah Orang yang mengikuti Sosper			12.000	SET WAN	2.100.000.000					
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD terfasilitasi		81%	SET WAN	400.000.000					
		Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD			4 laporan	SET WAN	400.000.000					
		Fasilitasi Tugas DPRD				Persentase tugas DPRD terfasilitasi		81 %	SET WAN	12.300.000.000					
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			4 Dokum en	SET WAN	5.000.000.000					
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah laporan kinerja fraksi, alat klnkapan dan kinerja DPRD yang disusun			1 dokum en	SET WAN	950.000.000					
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus			4 Dokum en	SET WAN	1.350.000.000					
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4 dokum en	SET WAN	5.000.000.000					
										123.955.000.000					

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Rancangan Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Rancangan Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto pada tahun 2026 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rancangan Renja Sekretariat DPRD tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Rancangan Renja Sekretariat DPRD tahun 2026, menjadi dasar bagi penyusunan RKA/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi tahun anggaran 2024, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian berdasar hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2024, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029.

Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan disusunnya Renja Tahun 2026 yang selanjutnya ditetapkan Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**

DEDY MUHARTADI, AP.MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001